



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN, ASET DAN
PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017-2022**

Tahun 2020



KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas petunjuk dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022. Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra BPKAPD Tahun 2017-2022 adalah untuk menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Renstra BPKAPD Tahun 2017-2022 ini. Semoga dengan ditetapkan Perubahan Renstra ini akan memberikan kejelasan dan manfaat bagi perkembangan Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dan semua pihak sebagai mitra kerja.

Laworo, 10 Januari 2020

Kepala BPKAPD,



ROSMA SARI LAUTE, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19640803 199211 2 001

DAFTAR ISI

| | Hal |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| DAFTAR TABEL | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Lata Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 5 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 7 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 10 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 10 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah | 18 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 21 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 38 |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 40 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah | 40 |
| 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih | 41 |
| 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi | 44 |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD | 44 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | 45 |

| | |
|--|----|
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN | 47 |
| 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah | 47 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 48 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 51 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 68 |
| BAB VIII PENUTUP | 70 |

DAFTAR GAMBAR

| | Hal |
|--|-----|
| Gambar. 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan | 5 |
| Gambar. 2.1 Struktur Organisasi BPKAPD | 17 |
| Gambar. 2.2 Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikaso SISMIOP | 20 |

DAFTAR TABEL

| | Hal |
|---|-----|
| Tabel. 2.1 Pegawai menurut Golongan/Ruang | 18 |
| Tabel. 2.2 Pegawai menurut Latar Pendidikan Formal | 18 |
| Tabel. 2.3 Pegawai menurut Esselon | 19 |
| Tabel. 2.4 Pegawai menurut Jenis Kelamin | 19 |
| Tabel. 2.5 Kendaraan Dinas | 19 |
| Tabel. 2.6 Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B | 20 |
| Tabel. 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD | 22 |
| Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat | 22 |
| Tabel. 2.9 Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 s/d 2018 | 34 |
| Tabel. 2.10 Anggaran dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Target Tahun 2019 | 35 |
| Tabel. 2.11 Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2017 s/d 2018 dan Target Tahun 2019 | 36 |
| Tabel. 2.12 Kinerja PAD pada BPKAPD Tahun 2017 dan 2018 | 37 |
| Tabel. 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAPD | 40 |
| Tabel. 3.2 Indikator Kinerja Utama BPKAPD | 43 |
| Tabel. 3.3 Telaah Rentra Kemendagri RI, Kemenkeu RI dan BKAD Prov. Sultra | 44 |
| Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 s/d 2022 | 47 |
| Tabel. 5.1 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat | 49 |
| Tabel. 5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan | 50 |
| Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat | 58 |
| Tabel. 7.1 Indikator Kinerja Utama BPKAPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD | 68 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Renstra PD adalah dokumen perencanaan teknis operasional Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra PD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian pembangunan secara menyeluruh. Renstra merupakan tolak ukur penilaian pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas/kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAPD, dan terutama menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kewajiban yang diemban seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis juga sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategis lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pendekatan strategis yang jelas dan sinergis. Guna mendukung terwujudnya *good and clean governance* dibutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu sehingga aspirasi masyarakat dan cita-cita bangsa dan negara terwujud melalui terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Rencana strategis yang disusun oleh BPKAPD mengacu pada visi, misi dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Kabupaten Muna Barat lima tahunan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Muna Barat dengan BPKAPD, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

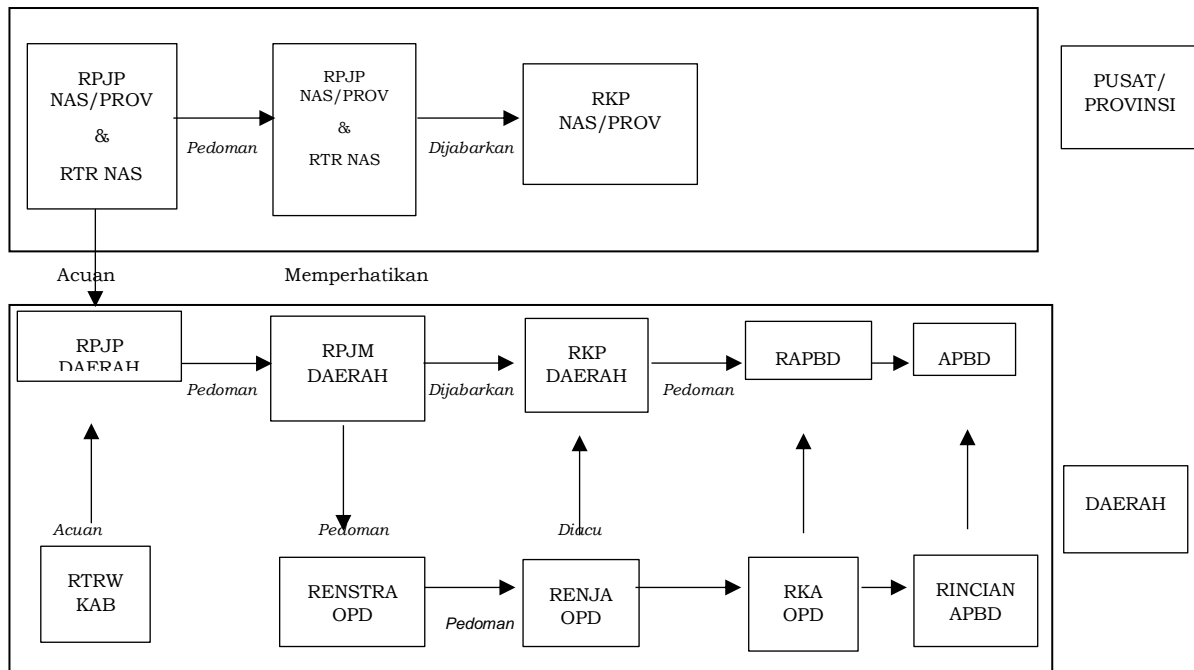
BPKAPD merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan unsur di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Maka BPKAPD sebagai satu-satunya organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang menerima pelimpahan wewenang dari Bupati Muna Barat selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk menyelenggarakan urusan pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Berdasarkan wewenang dan amanat yang diemban, maka BPKAPD bertekad untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang transparan dan akuntabel yang berbasis akrual dan bertekad untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam rangka memperkuat otonomi daerah. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga Renstra BPKAPD juga perlu dilakukan perubahan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh BPKAPD dengan mempergunakan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 sebagai acuannya. Perubahan Renstra BPKAPD tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun sebagai penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sebagai salah satu modal dasar terselenggaranya pembangunan daerah dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna. Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, maka BPKAPD ikut berperan mendukung Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat untuk mewujudkan tujuan dari ***misi 5 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.*** Selain itu, dokumen Renstra BPKAPD Kabupaten Muna Barat diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas dan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional. Melalui dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKAPD selama kurun waktu lima tahun (tahun 2017-2022) dalam

menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan Pemerintah Daerah pada aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada BPKAPD.

Dengan demikian dokumen Renstra BPKAPD akan memberi gambaran lima tahun ke depan (tahun 2017-2022) tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, sebagai arahan dalam menentukan arah kebijakan dan strategi dalam periode lima tahun ke depan (tahun 2017-2022). Dokumen Renstra juga dapat dipergunakan sebagai tolok ukur pengendalian dan evaluasi capaian kinerja BPKAPD dalam melaksanakan misi, pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan strategi, kebijakan, program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2017-2022 sebagai bentuk dukungan BPKAPD berpartisipasi mewujudkan visi, melaksanakan misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat sesuai dengan indikator kinerja sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD. Sehingga lima tahun kedepan BPKAPD sebagai institusi yang diberi wewenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah dapat melaksanakan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan efisien dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan daerah dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022. Dokumen Perubahan Renstra akan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, 2021 dan 2022. Adapun hubungan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1.1

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dilandasi dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk ke dua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kab./Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
20. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan pengelola Keuangan, Aset, Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Barat.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan yang merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja BPKAPD Kabupaten Muna Barat dan digunakan untuk mengarahkan dan

menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode lima tahun (tahun 2017-2022). Sehingga program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal oleh BPKAPD setiap tahunnya guna mendukung terwujudnya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAPD beserta indikator kinerja utama BPKAPD sebagai bentuk tolok ukur pertanggungjawaban kepala BPKAPD sebagai pengembal amanah kepada Bupati Muna Barat sebagai pemberi amanah.

Penyusunan dokumen Renstra BPKAPD tahun 2017-2022 memiliki tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen dasar/acuan penyusunan kebijakan lima tahun BPKAPD untuk mendukung terwujudnya visi, misi, program pembangunan dan sasaran daerah dari Bupati/Wakil Bupati Muna Barat yang telah ditetapkan dan bersinergis dengan visi, misi dan indikator kinerja dari sasaran strategis BPKAPD;
2. Sebagai pedoman dalam merumuskan program dan kegiatan beserta kerangka kebutuhan pendanaan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Sebagai pedoman dan alat kendali kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka evaluasi atas kinerja pelayanan BPKAPD terhadap pencapaian target indikator kinerja setiap tahun dalam kurun tahun 2017-2022;
4. Sebagai dasar penyusunan dokumen perjanjian kinerja antara Bupati Muna Barat dan Kepala BPKAPD untuk mewujudkan target kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dijanjikan dalam periode waktu satu tahun; dan
5. Sebagai bahan evaluasi meningkatkan kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAPD pada bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Renstra BPKAPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 menguraikan pokok bahasan dengan susunan garis besar berisi sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAPD

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKAPD
- 2.2 Sumber Daya BPKAPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan BPKAPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi strategi dan kebijakan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah secara efektif dan efisien.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatoif sebagaimana telah dirumuskan.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan peraturan Bupati Muna Barat Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Badan Lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat. BPKAPD Kabupaten Muna Barat berkedudukan sebagai Satuan kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna Barat yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPKAPD memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja BPKAPD diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat, dalam melaksanakan tugasnya BPKAPD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusun rumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
6. Melaksanakan kesekretariatan BPKAPD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan fungsi sebagaimana tersebut diatas, BPKAPD sebagai organisasi perangkat daerah yang memperoleh kewenangan dari Bupati Muna Barat sebagai kepala Pemerintahan Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan sebagai yang mewakili

pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditangani. Dalam pengelolaan keuangan daerah Bupati Muna Barat melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan daerah kepada yaitu sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
2. Kepala OPD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
3. Kepala OPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Sedang Bupati Muna Barat sebagai yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah telah melimpahkan ketugasan kepada Sekretaris Daerah selaku pengelola barang daerah yang dibantu oleh BPKAPD sebagai pembantu pengelola barang daerah. Dengan demikian BPKAPD dipimpin oleh Kepala Badan yang memiliki tiga fungsi yang melekat yaitu sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembantu pengelola barang daerah (Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Daerah); dan
3. Pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Pelimpahan wewenang tersebut ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Barat berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang. BPKAPD memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah di Pemerintah Kabupaten Muna Barat memiliki tekad untuk menciptakan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan dan aset daerah dengan meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai upaya memperkuat otonomi daerah. Selain itu BPKAPD juga sebagai penentu dalam memberi gambaran untuk menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), pengelolaan barang milik daerah dan koordinator pada pendapatan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan membawahi :
 - a. Sekertariat
 - b. Bidang Pendapatan
 - c. Bidang Anggaran
 - d. Bidang Akuntansi
 - e. Bidang Perbendaharaan
 - f. Bidang Aset
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Evaluasi
3. Bidang Pendapatan, membawahi :
 - a. Subbid Perpajakan
 - b. Subbid dan Pendapatan Lain-lain
 - c. Subbid Penagihan dan Pelaporan
4. Bidang Akuntansi membawahi:
 - a. Subbid Akuntansi
 - b. Subbid Pertanggungjawaban
 - c. Subbid Evaluasi dan Pelaporan
5. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Subbid Anggaran Pendapatan
 - b. Subbid Anggaran Belanja
 - c. Subbid Bina Keuangan
6. Bidang Aset membawahi:
 - a. Subbid Perencanaan dan Pemeliharaan Aset
 - b. Subbid Inventarisasi dan Penghapusan
 - c. Subbid Pengawasan dan Pengendalian
7. Bidang Perbendaharaan Membawahi :
 - a. Subbid Kasda
 - b. Subbid Belanja Langsung
 - c. Subbid Belanja Tidak Langsung

1. Bagian Sekretariat

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan tahunan;
- b. Merumuskan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Memberi dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan Administrasi Aset BPKAPD;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pendapatan

Tugas pokok Bidang Pendapatan adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Melaksanakan perencanaan dan pengembangan dan pendapatan daerah;
- c. Melaksanakan pengadministrasian pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- e. Perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, menghimpun dan mengolah data objek dan subjek Pajak Daerah;
- g. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah;
- h. Perhitungan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;
- j. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta melakukan penghapusan tunggakan;
- k. Pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Akuntansi

Tugas pokok Bidang Akuntansi adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang akuntansi dan pembinaan pengelolaan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- c. Penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
- d. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
- f. Penyajian laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas;
- g. Penyusunan laporan semesteran;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Anggaran

Tugas pokok Bidang Anggaran adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran;
- e. Penerbitan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPA/DPPA OPD;
- f. Penyusunan Analisa Standar Belanja dan Standar Harga Barang dan Jasa;
- g. Penyusunan Anggaran Kas;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Aset

Tugas pokok Bidang Aset adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang pengelolaan, inventarisasi aset dan pengolahan data serta pengendalian aset. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Aset, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Penyusunan rencana kebutuhan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- d. Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- e. Penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyusunan laporan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Pengoordinasian inventarisasi dan verifikasi barang milik daerah;
- i. Pemanfaatan barang milik daerah;
- j. Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah ; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perbendaharaan

Tugas pokok Bidang Perbendaharaan adalah melaksanakan sebagian tugas BPKAPD di bidang penerimaan dan pengeluaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Bendahara Umum Daerah, mempunyai fungsi :

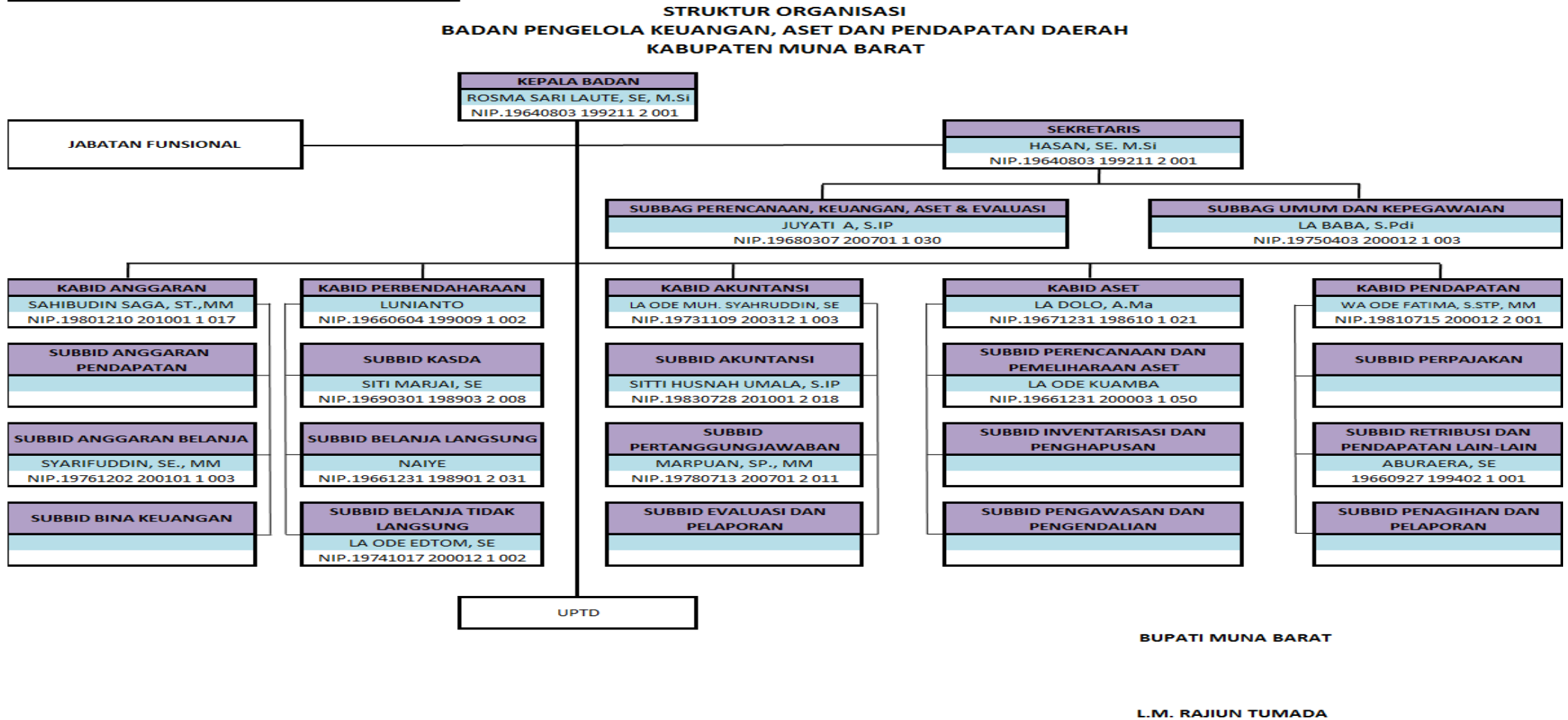
- a. Menyusun rencana kerja Bidang;
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang penerimaan dan pengeluaran kas;
- c. Pelaksanaan pembukuan administrasi penerimaan, pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
- e. Pengelolaan utang dan piutang daerah;

- f. Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
- g. Pengelolaan dan Penyaluran gaji ASN;
- h. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. Pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan dana transfer;
- j. Penyelenggaraan sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR);
- k. Penyelenggaraan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 Gaji ASN, dan Tabungan Perumahan (Taperum) ASN;
- l. Penyelenggaraan pembayaran iuran, dan pelaporan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM);
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BPKAPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar. 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (Nov 2019)

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2017



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menunjang pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kabupaten Muna Barat maka diperlukan adanya dukungan baik berupa Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarannya. Adapun Sumber Daya yang dimiliki tersebut adalah sebagai berikut :

1. Data Kepegawaain

Berdasarkan data kepegawaian per 30 November 2019 pegawai di lingkungan BPKAPD berjumlah 24 orang terdiri dari sebagai berikut :

- a. PNS sebanyak 18 orang.
- b. CPNS sebanyak 6 orang.

Jumlah ASN BPKAPD sebanyak 24 orang dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Tabel 2.1 Pegawai menurut Golongan/Ruang adalah sebagai berikut :

| No | Golongan/Ruang | Jumlah (orang) |
|----|---------------------------|----------------|
| 1. | Pembina Utama Muda (IV/c) | 1 |
| 2. | Pembina Tk. I (IV/b) | 1 |
| 3. | Pembina (IV/a) | 2 |
| 4. | Penata Tk. I (III/d) | 3 |
| 5. | Penata (III/c) | 8 |
| 6. | Penata Muda Tk.I (III/b) | 3 |
| 7. | Penata Muda (III/a) | 6 |

(data per 30 November 2019)

- b. Tabel 2.2 Pegawai menurut Latar Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah (orang) |
|----|--------------------|----------------|
| 1. | S2 (Pasca Sarjana) | 7 |
| 2. | S1 (Sarjana) | 13 |
| 3. | D3 (Diploma Tiga) | 1 |
| 4. | SMA/SMK/Sederajat | 3 |

(data per 30 November 2019)

c. Tabel 2.3 Pegawai menurut Esselon adalah sebagai berikut :

| No | Esselon | Jumlah (orang) |
|----|--------------|----------------|
| 1. | Esselon IIb | 1 |
| 2. | Esselon IIIa | 1 |
| 3. | Esselon IIIb | 5 |
| 4. | Esselon IVa | 10 |

(data per 30 November 2019)

d. Tabel 2.4 Pegawai menurut Jenis Kelamin adalah sebagai berikut :

| No | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) |
|----|---------------|----------------|
| 1. | Laki-Laki | 15 |
| 2. | Perempuan | 9 |

(data per 30 November 2019)

2. Data Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung terselenggaranya tugas pokok dan tata kerja serta pelayanan pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah BPKAPD telah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana telah tercatat dalam KIB B. Terdapat 30 unit peralatan dan perlengkapan kantor berupa sarana dan prasarana mobilitas dengan rincian disajikan pada tabel yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Kendaran Dinas

| NO | Jenis Barang | Jumlah (unit) |
|--------|------------------------------------|---------------|
| 1. | Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 | 3 |
| 2. | Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 | 27 |
| Jumlah | | 30 |

Sumber data : Sub. Keuangan dan Aset Sekretariat BPKAPD, data per 1 Januari 2019, diolah

Selain sarana dan prasarana yang mendukung mobilitas tersebut diatas BPKAPD juga telah dilengkapi dengan berbagai macam/jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan untuk mendukung kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh BPKAPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan Bidang Pendapatan. Data peralatan dan perlengkapan kantor beserta jumlah

per 1 Januari 2019 sebagaimana yang dicantumkan dalam KIB B disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.6

Sarana dan Prasarana BKAD Berdasarkan KIB B (selain Kendaraan Dinas/Operasional) per 31 Desember 2018

| No | Jenis Barang | Jumlah (unit) | No | Jenis Barang | Jumlah (unit) |
|--------------|------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 | AC | 6 | 26 | Kursi Rapat | 50 |
| 2 | Acces Point Wifi | 1 | 27 | LAN Tester | 2 |
| 3 | Brand Kas | 1 | 28 | Laptop | 41 |
| 4 | Camera | 1 | 29 | LCD | 1 |
| 5 | Camera CCTV | 1 | 30 | Lemari /Rak Besi | 22 |
| 6 | Dispenser | 4 | 31 | Lemari Arsip | 8 |
| 7 | Filing Kabinet | 9 | 32 | Lemari Kecil (Loker) | 8 |
| 8 | Genset | 2 | 33 | Meja Bundar Besar | 1 |
| 9 | Gorden + Aksesoris | 38 | 34 | Meja Bundar Kecil | 1 |
| 10 | Infokus | 1 | 35 | Meja Kerja | 46 |
| 11 | Kabel Jaringan | 1 | 36 | Meja Kerja Eselon | 18 |
| 12 | Kaca Rias | 1 | 37 | Meja Kerja Staf | 7 |
| 13 | Kamera | 1 | 38 | Meja Rapat | 7 |
| 14 | Kipas Angin | 21 | 39 | Mesin Cetak Porporasi | 1 |
| 15 | Notebook | 24 | 40 | Mesin Ketik | 1 |
| 16 | Komputer PC | 24 | 41 | Mesin Pompa Air | 1 |
| 17 | Komputer Server | 2 | 42 | Pengaman Jendela | 19 |
| 18 | Konektor Kabel (RJ_45) | 5 | 43 | Peralatan Jaringan | 2 |
| 19 | Krimping Tool | 2 | 44 | Printer | 79 |
| 20 | Kursi Kerja | 50 | 45 | Projektor | 1 |
| 21 | Kursi Kerja Eselon III | 3 | 46 | Warles Speaker | 1 |
| 22 | Kursi Kerja Eselon IV | 20 | 47 | Televisi | 3 |
| 23 | Kursi Kerja Staf | 50 | 48 | Swich Hub | 1 |
| 24 | Kursi Sofa | 1 | 49 | Sound System | 1 |
| 25 | Kursi Tunggu | 4 | | | |
| | Jumlah | 273 | Jumlah | | 322 |
| Jumlah KIB B | | | | | 595 |

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pada bidang keuangan, aset dan pendapatan daerah BPKAD telah memanfaatkan teknologi informasi yaitu dengan mempergunakan sistem manajemen informasi yang terintegrasi dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan aset daerah yaitu antara lain Simda Keuangan Daerah, Simda BMD dan SISMIOP.



Gambar. 2.2 Aplikasi Simda Keuangan dan Aplikaso SISMIOP

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPKAPD merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang melaksanakan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dengan ketugasan melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah sesuai dengan pelimpahan wewenang dari Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan barang daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah Kabupaten Muna Barat. Sebagaimana telah dibahas pada sub bab diatas BPKAPD sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan sesuai urusan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi yang ditangani adalah pelayanan pada sektor pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam menganalisa kinerja pelayanan BPKAPD selama periode Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 dengan mengukur capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator kinerja dari sasaran daerah Surat Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan, Aset Dan Pendapatan Daerah Nomor Tahun 2018 tentang indikator Kinerja Utama, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD
Kabupaten Muna Barat

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capain Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capain Tahun ke- | | | | | |
|----|--|---|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Opini WTP WTP = 1 WDP = 2 Disclaimer = 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | | |

Tabel sebagaimana tersebut diatas menunjukkan pencapaian indikator kinerja utama BPKAPD yang dibedakan sebelum dan sesudah dilakukan review RPJMD yaitu sebagai berikut : indikator kinerja utama setelah dilakukan review RPJMD (tahun 2017-2022) yang memiliki target capaian setiap tahun adalah 1. Adapun capaian setiap tahun indikator kinerja utama yaitu Opini BPK RI atas LKPD Kabupaten Muna Barat adalah 1.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat

| No | Uraian BPKAPD | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- | | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan | |
|----|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------|------|---|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | Anggaran | Realisasi |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3,049,200 | 3,272,750 | 2,837,200 | 2,792,229 | | | 2,819,297 | 2,898,830 | 2,837,200 | 2,792,229 | | | 92 | 89 | 100 | 100 | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 2 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1,500 | 1,500 | | | | 1,500 | 1,470 | | | | 100 | 98 | - | - | | | | |
| 3 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik | 202,000 | 170,200 | 101,200 | 140,000 | | 143,626 | 135,929 | 101,200 | 140,000 | | 71 | 80 | 100 | 100 | | | | |
| 4 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas | 15,000 | 15,000 | 10,000 | 13,000 | | 2,663 | 331 | 10,000 | 13,000 | | 18 | 2 | 100 | 100 | | | | |
| 5 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 115,600 | 195,600 | 164,900 | 179,400 | | 113,600 | 169,400 | 164,900 | 179,400 | | 98 | 87 | 100 | 100 | | | | |
| 6 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 10,500 | 10,500 | 7,000 | 20,000 | | 10,484 | 10,450 | 7,000 | 20,000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 7 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 87,600 | 90,050 | 84,000 | 90,000 | | 87,575 | 90,000 | 84,000 | 90,000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 8 | Penyediaan Cetakan Dan Peggandaan | 55,000 | 128,500 | 96,500 | 129,829 | | 53,900 | 113,300 | 96,500 | 129,829 | | 98 | 88 | 100 | 100 | | | | |
| 9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,000 | 12,000 | 24,000 | 24,000 | | 9,950 | 11,950 | 24,000 | 24,000 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 10 | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundan-Undangan | 95,000 | 160,000 | 39,000 | 50,000 | | 91,020 | 156,940 | 39,000 | 50,000 | | 96 | 98 | 100 | 100 | | | | |
| 11 | Penyediaan Makanan Dan Minuman | 103,000 | 125,400 | 130,500 | 220,000 | | 86,710 | 124,980 | 130,500 | 220,000 | | 84 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 12 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah | 701,000 | 795,000 | 1,096,000 | 820,000 | | 693,949 | 789,680 | 1,096,000 | 820,000 | | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 13 | Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran | 1,635,000 | 1,550,000 | 1,084,100 | 1,076,000 | | 1,514,500 | 1,294,400 | 1,084,100 | 1,076,000 | | 93 | 84 | 100 | 100 | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|---------|--|-----------|---------|---------|---------|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 14 | Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | 18,000 | 19,000 | | | | 9,820 | - | | | | 55 | - | - | - | | | | |
| 15 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 30,000 | | | | | 30,000 | | | | - | 100 | | | | |
| 16 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 1,326,100 | 425,000 | 955,190 | 670,300 | | 1,275,564 | 249,591 | 955,190 | 670,300 | | 96 | 59 | 100 | 100 | | | | |
| 17 | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional | 455,000 | - | 480,000 | 180,000 | | 443,500 | - | 480,000 | 180,000 | | 97 | - | 100 | 100 | | | | |
| 18 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | 663,100 | 295,000 | 186,000 | 50,000 | | 647,900 | 134,988 | 186,000 | 50,000 | | 98 | 46 | 100 | 100 | | | | |
| 19 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional | 140,000 | 85,000 | 145,000 | 120,000 | | 139,264 | 84,703 | 145,000 | 120,000 | | 99 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 20 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | 23,000 | 15,000 | 37,000 | 37,000 | | - | - | 37,000 | 37,000 | | - | - | 100 | 100 | | | | |
| 21 | Pemeliharaan/ Penataan Lingkungan Gedung Kantor | 45,000 | 30,000 | 107,190 | 128,300 | | 44,900 | 29,900 | 107,190 | 128,300 | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 22 | Program Peningkatan Disiplin Aparatur. | 72,000 | 120,000 | 9,000 | | | 44,100 | 120,000 | 9,000 | | | 61 | 100 | 100 | - | | | | |
| 23 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | | | 9,000 | | | | | 9,000 | | | - | - | 100 | - | | | | |
| 24 | Pengadaan Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu | 72,000 | 120,000 | | | | 44,100 | 120,000 | | | | 61 | 100 | - | - | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|-------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 25 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. | 303,000 | 290,000 | 370,100 | 203,000 | | | 300,436 | 288,214 | 370,100 | 203,000 | | | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 26 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | 260,000 | 275,000 | 70,000 | 60,000 | | | 258,486 | 273,564 | 70,000 | 60,000 | | | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 27 | Pendidikan Dan Pelatihan Non Formal | | | 110,000 | | | | | | 110,000 | | | | | | 100 | - | | | | |
| 28 | Penyusunan Standar Operasional Prosedur | 43,000 | 15,000 | 30,100 | 15,000 | | | 41,950 | 14,650 | 30,100 | 15,000 | | | 98 | 98 | 100 | 100 | | | | |
| 29 | Meningkatnya Kinerja Kesekretariatan | | | 160,000 | 128,000 | | | | | 160,000 | 128,000 | | | | | 100 | 100 | | | | |
| 30 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 42,000 | 63,500 | 132,800 | 75,500 | | | 673,800 | 63,250 | 132,800 | 75,500 | | | 1,604 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 31 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10,000 | 26,000 | 68,600 | 44,000 | | | 9,500 | 25,900 | 68,600 | 44,000 | | | 95 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 32 | Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan Dan Semesteran | 7,000 | 15,000 | 31,700 | 15,000 | | | 640,000 | 14,900 | 31,700 | 15,000 | | | 9,143 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 33 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 25,000 | 22,500 | 32,500 | 16,500 | | | 24,300 | 22,450 | 32,500 | 16,500 | | | 97 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 34 | Program Peningkatan Kapasitas Perencanaan | 68,000 | 37,000 | | | | | 57,500 | 36,700 | | | | | 85 | 99 | - | - | | | | |
| 35 | Koordinasi Pelaksanaan Musrembang | 12,000 | | | | | | 8,500 | | | | | | 71 | - | - | - | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|-----------|-----------|---------|--|--|-----|----|---------|---------|--|--|--|--|
| 36 | Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD | 41,000 | 37,000 | | | | 34,000 | 36,700 | | | | | 83 | 99 | #DIV/0! | #DIV/0! | | | | |
| 37 | Penyusunan Rencana Kerja Anggaran | 15,000 | | | | | 15,000 | | | | | | 100 | - | - | - | | | | |
| 38 | Program Perencanaan Anggaran Daerah | 1,043,639 | 1,307,513 | 1,055,200 | 889,498 | | 999,716 | 1,277,245 | 1,055,200 | 889,498 | | | 96 | 98 | 100 | 100 | | | | |
| 39 | Penyusunan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2018 | 30,500 | 28,500 | | | | 22,495 | 28,300 | | | | | 74 | 99 | - | - | | | | |
| 40 | Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD | 45,000 | 55,000 | 83,800 | 41,500 | | 39,130 | 53,388 | 83,800 | 41,500 | | | 87 | 97 | 100 | 100 | | | | |
| 41 | Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pergeseran Anggaran SKPD | 25,639 | 24,000 | | | | 25,639 | 23,746 | | | | | 100 | 99 | - | - | | | | |
| 42 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 112,000 | 75,998 | 58,500 | 50,998 | | 95,464 | 75,147 | 58,500 | 50,998 | | | 85 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 43 | Analisis Dan Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung | 25,000 | 25,000 | 26,700 | 21,000 | | 24,500 | 23,850 | 26,700 | 21,000 | | | 98 | 95 | 100 | 100 | | | | |
| 44 | Pembinaan Dan Evaluasi APBD Desa | 30,000 | 20,000 | 19,000 | 14,000 | | 29,500 | 19,475 | 19,000 | 14,000 | | | 98 | 97 | 100 | 100 | | | | |
| 45 | Verifikasi Bantuan Sosial Dan Hibah | 12,000 | 21,000 | 15,400 | 12,000 | | 5,000 | 20,010 | 15,400 | 12,000 | | | 42 | 95 | 100 | 100 | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|--|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 46 | Pendamping Aplikasi Simda Keuangan | | 57,600 | 54,100 | 50,000 | | | 38,602 | 54,100 | 50,000 | | | - | 67 | 100 | 100 | | | | |
| 47 | Penyusunan Standar Satuan Harga | | 32,000 | | | | | 30,880 | | | | | - | 97 | - | - | | | | |
| 48 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kdh Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 | 511,400 | 672,000 | 503,500 | 450,000 | | 507,277 | 669,233 | 503,500 | 450,000 | | | 99 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 49 | Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019 | 252,100 | 296,415 | 294,200 | 250,000 | | 250,711 | 294,614 | 294,200 | 250,000 | | | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 50 | Program Penataan Pengelolaan Aset Daerah | 607,030 | 651,600 | 932,300 | 374,000 | | 515,487 | 513,276 | 932,300 | 374,000 | | | 85 | 79 | 100 | 100 | | | | |
| 51 | Pengamanan Dan Pemeliharaan Aset Daerah | 62,030 | 70,000 | 56,200 | 47,000 | | 58,070 | 66,103 | 56,200 | 47,000 | | | 94 | 94 | 100 | 100 | | | | |
| 52 | Revaluasi Atau Appraisal Dan Penyerahan Aset | 144,300 | 90,000 | 549,500 | 80,000 | | 112,028 | 63,257 | 549,500 | 80,000 | | | 78 | 70 | 100 | 100 | | | | |
| 53 | Standar Sarana Dan Prasarana Daerah | 62,000 | | | | | 60,135 | | | | | | 97 | - | - | - | | | | |
| 54 | Penatausahaan Barang Aset Daerah | 241,000 | 83,000 | | | | 237,439 | 77,465 | | | | | 99 | 93 | - | - | | | | |
| 55 | Penghapusan Dan Perubahan Status Hukum Barang Milik Daerah | 73,600 | 63,000 | 87,800 | 59,000 | | 39,290 | 39,624 | 87,800 | 59,000 | | | 53 | 63 | 100 | 100 | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|--|----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| 56 | Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Aset Daerah | 24,100 | | | | | 8,525 | | | | | | 35 | - | - | - | | | | |
| 57 | Rapat-Rapat Koordinasi Dan Evaluasi Aset Barang Milik Daerah | | 60,000 | | | | | 58,722 | | | | | - | 98 | - | - | | | | |
| 58 | Sensus Barang Milik Daerah | | 70,000 | 78,400 | 70,000 | | | 66,540 | 78,400 | 70,000 | | | - | 95 | 100 | 100 | | | | |
| 59 | Monitoring Dan Evaluasi Aset Daerah | | 27,500 | | | | | 21,350 | | | | | - | 78 | - | - | | | | |
| 60 | Verifikasi Dan Klarifikasi Hasil Sensus Barang Milik Daerah | | 87,500 | 101,400 | 77,000 | | | 76,165 | 101,400 | 77,000 | | | - | 87 | 100 | 100 | | | | |
| 61 | Pendamping Implementasi Simda BMD | | 50,000 | 40,600 | 29,000 | | | - | 40,600 | 29,000 | | | - | - | 100 | 100 | | | | |
| 62 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah | | 50,600 | 18,400 | 12,000 | | | 44,050 | 18,400 | 12,000 | | | - | 87 | 100 | 100 | | | | |
| 63 | Program Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah | 342,400 | 428,500 | 274,250 | 191,000 | | 202,011 | 200,795 | 274,250 | 191,000 | | | 59 | 47 | 100 | 100 | | | | |
| 64 | Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah | 64,450 | 52,000 | 56,500 | 52,000 | | 46,648 | 46,684 | 56,500 | 52,000 | | | 72 | 90 | 100 | 100 | | | | |
| 65 | Pembinaan Pengendalian Dan Pengkajian Pad | 55,000 | 53,000 | 77,550 | 43,000 | | 25,981 | 29,768 | 77,550 | 43,000 | | | 47 | 56 | 100 | 100 | | | | |
| 66 | Pengawasan Dan Penagihan Pad | 58,000 | 49,500 | | | | 29,535 | 33,931 | | | | | 51 | 69 | - | - | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------|---------|---------|--------|--|--------|--------|---------|--------|--|----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| 67 | Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah | 50,000 | | | | | 38,534 | | | | | 77 | - | - | - | | | | |
| 68 | Pengolahan Data Pajak Dan Retribusi Daerah | 25,000 | 53,000 | 52,950 | 48,000 | | 12,500 | 31,561 | 52,950 | 48,000 | | 50 | 60 | 100 | 100 | | | | |
| 69 | Sosialisasi Dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Pajak Daerah | 47,000 | 57,750 | | | | 30,875 | 1,500 | | | | 66 | 3 | - | - | | | | |
| 70 | Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah | 42,950 | 54,000 | 87,250 | 48,000 | | 17,938 | 39,207 | 87,250 | 48,000 | | 42 | 73 | 100 | 100 | | | | |
| 71 | Bimbingan Teknis Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah | | 43,000 | | | | | - | | | | - | - | - | - | | | | |
| 72 | Bimbingan Teknis Sop Dan Pajak Retribusi Daerah | | 42,000 | | | | | - | | | | - | - | - | - | | | | |
| 73 | Penyusunan Produk Hukum Pajak Daerah | | 24,250 | | | | | 18,145 | | | | - | 75 | - | - | | | | |
| 74 | Program Pengelolaan Dan Penuntasan Administrasi PBB Dan BPHTB | 760905 | 247243 | 607300 | 209442 | | 135210 | 139311 | 607300 | 209442 | | 18 | 56 | 100 | 100 | | | | |
| 75 | Pencetakan Dan Penyerahan SPPT PBB PP | 95,705 | 112,300 | 110,800 | 95,400 | | 71,400 | 95,109 | 110,800 | 95,400 | | 75 | 85 | 100 | 100 | | | | |
| 76 | Peningkatan Motivasi Pemungutan PBB Dan BPHTB | 40,700 | | | | | 5,950 | | | | | 15 | - | - | - | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|--|--|----|----|-----|-----|--|--|--|--|
| 77 | Pengembangan Dan Kostominasasi Pengelolaan PBB PP | 543,000 | | 335,000 | | | 42,400 | | 335,000 | | | | 8 | - | 100 | - | | | | |
| 78 | Sarana Dan Prasarana Pengelolaan PBB PP | 81,500 | | | | | 15,460 | | | | | | 19 | - | - | - | | | | |
| 79 | Pemutakhiran Zona Nilai Tanah | | 53,000 | 59,000 | 58,000 | | | - | 59,000 | 58,000 | | | - | - | 100 | 100 | | | | |
| 80 | Pendampingan Aplikasi Sismiob PBB PP | | 13,800 | | | | | - | | | | | - | - | - | - | | | | |
| 81 | Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah | | 68,143 | 102,500 | 56,042 | | | 44,202 | 102,500 | 56,042 | | | - | 65 | 100 | 100 | | | | |
| 82 | Program Pengelolaan Perbendaharaan | 857,000 | 810,000 | 826,060 | 567,860 | | 745,099 | 789,829 | 826,060 | 567,860 | | | 87 | 98 | 100 | 100 | | | | |
| 83 | Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Belanja Tidak Langsung | 204,000 | 185,000 | 248,596 | 139,500 | | 188,018 | 182,638 | 248,596 | 139,500 | | | 92 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 84 | Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 130,000 | 108,000 | 150,760 | 88,360 | | 118,798 | 104,193 | 150,760 | 88,360 | | | 91 | 96 | 100 | 100 | | | | |
| 85 | Verifikasi Dan Pembinaan Penata Usahaan Belanja Langsung Dan Pengelola Keuangan Daerah | 290,000 | 245,000 | 188,704 | 116,000 | | 248,320 | 241,050 | 188,704 | 116,000 | | | 86 | 98 | 100 | 100 | | | | |
| 86 | Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tptgr | - | 57,000 | 60,200 | 56,000 | | - | 52,582 | 60,200 | 56,000 | | | - | 92 | 100 | 100 | | | | |
| 87 | Adminstrasi Dan Pelaporan Gaji PNS | 65,000 | | | | | 49,445 | | | | | | 76 | - | - | - | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|---------|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 88 | Evaluasi Dan Pelaporan Pengelolaan Pajak | 75,000 | 75,000 | 57,600 | 53,000 | | | 67,168 | 70,753 | 57,600 | 53,000 | | | 90 | 94 | 100 | 100 | | | | |
| 89 | Verifikasi Dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah | 93,000 | 140,000 | 120,200 | 115,000 | | | 73,350 | 138,613 | 120,200 | 115,000 | | | 79 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 90 | Program Penata Usahaan Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah | 898,361 | 943,500 | 935,600 | 672,000 | | | 873,590 | 940,006 | 935,600 | 672,000 | | | 97 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 91 | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah & Peraturan Kdh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 313,000 | 298,000 | 322,000 | 188,000 | | | 311,914 | 297,506 | 322,000 | 188,000 | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 92 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pelaksanaan APBD | 195,000 | 196,000 | 172,000 | 98,000 | | | 191,739 | 195,706 | 172,000 | 98,000 | | | 98 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 93 | Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 | | 160,000 | 180,000 | 180,000 | | | | 158,679 | 180,000 | 180,000 | | | - | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 94 | Updating Dan Penyusunan Neraca Daerah | 60,000 | 50,000 | 48,600 | 38,000 | | | 58,760 | 49,650 | 48,600 | 38,000 | | | 98 | 99 | 100 | 100 | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|---------|--------|--------|--|--|--------|---------|--------|--------|--|--|----|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| 95 | Evaluasi Pelaporan Dan Pembinaan Pada Bendahara Penerimaan Dan Pengeluaran Pengelolaan Keuangan Daerah | 85,000 | 69,000 | 53,400 | 44,000 | | | 83,610 | 68,735 | 53,400 | 44,000 | | | 98 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 96 | Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan Daerah | 99,361 | 80,000 | 80,600 | 61,000 | | | 98,110 | 79,550 | 80,600 | 61,000 | | | 99 | 99 | 100 | 100 | | | | |
| 97 | Verifikasi Dan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan Dan Pengeluaran Keuangan Daerah | 98,000 | 75,000 | 79,000 | 63,000 | | | 96,710 | 74,750 | 79,000 | 63,000 | | | 99 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 98 | Revisi Kebijakan Akuntansi | 48,000 | 15,500 | | | | | 32,747 | 15,430 | | | | | 68 | 100 | - | - | | | | |
| 99 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. | 66,500 | 120,000 | | | | | 44,500 | 106,445 | | | | | 67 | 89 | - | - | | | | |
| 100 | Kajian Antar Daerah | 60,000 | 90,000 | | | | | 39,000 | 89,095 | | | | | 65 | 99 | - | - | | | | |
| 101 | Sosialisasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah | 6,500 | 30,000 | | | | | 5,500 | 17,350 | | | | | 85 | 58 | - | - | | | | |

BPKAPD sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang keuangan daerah bertugas membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan maka pelayanan yang diselenggarakan meliputi pelayanan pada bidang pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Keberhasilan atau kegagalan terselenggaranya pelayanan pada urusan penunjang keuangan oleh BPKAPD dipergunakan alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran dan hasil yang menggambarkan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana telah dibahas diatas.

1. Kinerja Pelayanan pada Pengelolaan Keuangan Daerah

Ukuran keberhasilan atau kegagalan dari kinerja pelayanan pada sektor pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel adalah diterbitnya opini BPK RI atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD). Pemberian opini tersebut sebagai bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah. LKPD sebagai media akuntabilitas atas sistem manajemen keuangan daerah yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) meliputi sistem perencanaan dan penganggaran, sistem pelaksanaan anggaran, sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang memenuhi unsur-unsur pengendalian internal dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Opini BPK tersebut dipergunakan sebagai indikator untuk mengukur akuntabilitas atas tata kelola keuangan daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat. Perkembangan opini yang diterbitkan BPK selama periode tahun 2016 s/d tahun 2019 sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Muna Barat tahun 2015, LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2016, LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 dan LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Tabel. 2.9
Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 s/d
2018

| TAHUN | OPINI BPK | KETERANGAN |
|-------|-----------|--|
| 2016 | WDP | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2015 |
| 2017 | WTP | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 |
| 2018 | WTP | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 |
| 2019 | WTP | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2018 |

Sumber Data : BPKAPD, 2019.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Muna Barat selalu berupaya meraih opini WTP murni atau WTP tanpa catatan.

2. Kinerja Pelayanan Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah)

Sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab kepala BPKAPD sebagai pejabat penatausahaan barang dan kepala bidang Aset sebagai pengurus barang pengelola yaitu mengkoordinir pengelolaan BMD yang ada pada masing-masing OPD/Unit Kerja dan membantu pengelola BMD dalam melaksanakan kewenangannya maka dalam rangka mendapatkan data aset daerah Kabupaten Muna Barat sesuai dengan kondisi riil telah dilaksanakan program pengelolaan barang daerah yaitu dengan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset daerah yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah. Setiap OPD atau Unit Kerja selaku pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus melakukan penatausahaan aset atas aset daerah yang berada di bawah penguasaannya. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang menyusun pelaporan aset daerah dengan menyajikan informasi terkait aset daerah pada waktu tertentu yaitu laporan semesteran dan laporan tahunan disampaikan kepada Bupati Muna Barat melalui Pengelola Barang Daerah. Laporan-laporan barang daerah yang disusun oleh pengguna/kuasa pengguna barang dihimpun oleh Bidang Aset (BPKAPD) selaku pengurus barang pengelola dan membantu ketugasan Kepala BPKAPD dalam melaksanakan ketugasan selaku pejabat penatausahaan barang menjadi Laporan Barang

Milik Daerah Daerah yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Sehingga dengan pengelolaan barang milik daerah bertujuan agar terdapat kejelasan status kepemilikan barang milik daerah, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan barang milik daerah, dan memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaporkan kondisi dan nilai barang milik daerah secara berkala.

3. Kinerja pada pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Persentase PAD terhadap pendapatan daerah dipergunakan untuk menginformasikan kontribusi atau peranan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Perkembangan angka persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2017, dan tahun 2018 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
Tahun 2017, Tahun 2018, dan Target Tahun 2019
(dalam ribu)

| Uraian | 2017 | | 2018 | | 2019 | |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| PAD | 24.356.440 | 38.810.929,62 | 32.750.626 | 32.972.030,2 | 36.931.439,4 | 36.931.439,4 |
| Dana Perimbangan | 472.198.477 | 468.633.724,98 | 488.811.813 | 492.690.813,3 | 537.054.561 | 537.054.561 |
| Lain² Pendapatan Daerah Yang Sah | 67.931.659,89 | 72.193.439,21 | 81.634.320,8 | 76.193.439,2 | 104.227.149,5 | 104.227.149,5 |
| JUMLAH | 564.486.576,89 | 579.638.093,81 | 603.196.759,8 | 601.856.282,7 | 678.213.149,9 | 678.213.149,9 |
| % PAD terhadap Pendapatan Daerah | 4,3% | 6,7% | 5,4% | 5,5% | 5,4% | 5,4% |

Sumber data : Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017 dan tahun 2018, diolah

Tabel 2.11 menunjukkan bahwa kontribusi tertinggi sebagai sumber pendapatan daerah adalah PAD yang ditarget sebesar 4,3% dan terealisasi sebesar 6,7% maka persentase capaian indikator kinerja ini sebesar 163% katagori **Sangat Berhasil**.

Tercapainya target indikator kinerja pada persentase tercapainya PAD tahun 2017 didukung terlaksananya Program Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari kegiatan-kegiatan memiliki kinerja keluaran (*output*) sesuai dengan target atau memiliki angka persentase capaian 100% yaitu (1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah, (2)

Pembinaan Pengendalian dan Pengkajian PAD, (3) Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah dan (4) Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah.

b. Persentase PAD terhadap Belanja Daerah

Persentase PAD terhadap belanja daerah dipergunakan untuk mengetahui peranan PAD dalam membiayai belanja daerah. Selama periode tahun 2017-2019 persentase pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yang dicapai dan yang ditarget tahun 2019 berdasarkan APBD Kabupaten Muna Barat tahun 2019 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.11

Kontribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap Belanja Daerah Periode Tahun 2017 s/d 2018 dan Target Tahun 2019 (dalam ribu Rupiah)

| Uraian | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | Target 2019 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Pendapatan Asli Daerah | 38.810.930 | 32.972.030 | 9.658.168 |
| Dana Perimbangan | 468.633.725 | 492.690.813 | 398.809.762 |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | 72.174.229 | 76.193.439 | 74.175.366 |
| Belanja Daerah | 716.282.865 | 672.838.105 | 34.531.835 |
| Kontribusi PAD Terhadap Belanja Daerah (%) | 5,42 | 4,90 | 27,97 |
| Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah (%) | 65,43 | 73,23 | 1154,90 |
| Kontribusi Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah (%) | 10,08 | 11,32 | 214,80 |

Sumber Data : BPKAPD 2019

Kemampuan PAD sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah yang telah dicapai selama periode tahun 2017-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahun atau perkembangan persentase kontribusi PAD terhadap belanja daerah berkisar antara 5% berdasarkan APBD Kabupaten Muna Barat TA 2017 target persentase kontribusi pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 5,42%. Dalam periode tersebut dana perimbangan memiliki kontribusi yang terbesar sebagai sumber utama dalam mendanai belanja daerah dengan angka persentase diatas 50% atau berkisar antara 65,43% serta menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya. Sedangkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terhadap belanja daerah yaitu sebesar 10,08%.

4. Kinerja BPKAPD sebagai OPD Penghasil

Kemandirian dalam bidang keuangan daerah biasanya diukur dengan kontribusi atau peranan PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah juga dapat diketahui kontribusi pendapatan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Pemungutan atas pajak daerah di Pemerintah Kabupaten Muna Barat dilaksanakan oleh BPKAPD dalam kapasitasnya sebagai PPKD. Selain itu pendapatan dari pajak daerah, BPKAPD juga mengelola hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Selama periode tahun 2017 s/d 2018 PAD yang dikelola oleh BPKAPD selaku OPD menunjukkan kinerja pendapatan daerah yang baik yaitu setiap tahun target PAD dapat tercapai dengan angka persentase capaian diatas 100%, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.12
Kinerja PAD pada BPKAPD (OPD Penghasil) Tahun 2017 dan 2018
(dalam ribu)

| Uraian | 2017 | | | 2018 | | | 2019 |
|---|------------|------------|-----|------------|------------|-----|-----------|
| | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran | Realisasi | % | Anggaran |
| Pajak Daerah | 3,298,362 | 3,777,132 | 115 | 5,299,373 | 3,529,270 | 67 | 1,808,718 |
| Retribusi Daerah | 302,239 | 990,408 | 328 | 1,380,000 | 850,429 | 62 | 483,590 |
| Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 522,463 | 522,763 | 100 | 522,763 | 514,911 | 98 | 1,174,220 |
| Lain-lain PAD yang sah | 20,233,377 | 33,520,627 | 166 | 25,548,490 | 28,077,419 | 110 | 6,191,639 |

Sumber Data : BPKAPD 2019.

Angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat menunjukkan angka persentase yang berfluktuatif dalam periode dua tahun menunjukkan perkembangan yang baik dengan angka persentase tertinggi dicapai tahun 2017 yaitu sebesar 115%. Pada tahun berikutnya angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 67%. Sedang tahun 2019 direncanakan angka persentase kontribusi Pajak Daerah yang dikelola BPKAPD terhadap realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Muna Barat sebesar 100%.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak terlepas dengan berbagai permasalahan yang dijumpai sebagai hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan tata kerja pada bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dengan harapan tantangan-tantangan tersebut tidak lagi menjadi faktor penghambat jalannya pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah pada periode yang akan datang. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah yang dipengaruhi belum konsistennya Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan dengan rencana yang telah dituangkan dalam DPA, sehingga penyerapan dana sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Komitmen Perangkat Daerah/unit kerja selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang masih rendah dalam melaksanakan tata kelola barang milik daerah;
3. Belum terwujudnya kehormanan informasi antara pengelola keuangan dan pengelola barang di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
4. Belum maksimalnya SDM pengelola barang milik daerah di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja;
5. Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam menyusun RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) dan RKPBM (Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah) belum disesuaikan dengan kebutuhan;
6. Belum optimalnya penerapan manajemen aset di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja atau belum terwujudnya tata kelola aset daerah yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset daerah;
7. Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi masih rendah;
8. Belum adanya database potensi pendapatan daerah;
9. Belum terkoordinirnya penanganan pendapatan secara menyeluruh dan terintegrasi;

Sedangkan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk menjadikan BPKAPD sebagai satu-satunya Perangkat Daerah yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan administrasi keuangan daerah dengan melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
2. Komitmen Pemerintah Kabupaten Muna Barat untuk mempertahankan opini WTP atas LKPD Kabupaten Muna Barat melalui pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual.
3. Tuntutan agar birokrasi pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel.
4. Perkembangan Teknologi informasi yang pesat membantu dalam proses pengumpulan data, analisis, peramalan dan pengambilan keputusan.
5. Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam mengelola pajak dan retribusi daerah.
6. Pertumbuhan ekonomi yang stabil.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dipergunakan untuk menentukan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kewenangannya. Isu strategis merupakan suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang khususnya terselenggaranya pelayanan OPD. Kinerja pelayanan yang telah diselenggarakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKAPD beserta berbagai permasalahan yang dihadapi selama tahun 2017-2018 sebagaimana telah dibahas pada Bab sebelumnya maka telah diidentifikasi permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada BPKAPD yaitu sebagai berikut :

Tabel. 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKAPD

| No | Masalah Pokok | Rumusan Masalah | Akar Masalah |
|----|---|---|---|
| 1. | Pengelolaan Keuangan Belum Optimal | Sistem Pengelolaan Keuangan Belum Terintegrasi | Penyerapan belanja belum sesuai dengan alokasi anggaran belanja |
| | | Laporan Keuangan berbasis akrual belum optimal | Pemahaman pengelolaan keuangan masing-masing perangkat daerah mengenai akuntansi pemerintah berbasis akrual belum memadai |
| 2. | Pengelolaan Barang Milik Daerah belum memadai | Belum dapat mewujudkan <i>good governance</i> dalam tata kelola Barang Milik Daerah | Adminstrasi perencanaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset daerah belum tertib. |

| | | | |
|----|--------------------------------------|--|---|
| | | | Sistem Informasi Aset belum optimal |
| 3. | Pengelolaan pendapatan belum optimal | Kemampuan keuangan masih tergantung dari transfer pemerintah pusat | Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah belum tergali secara optimal |
| | | Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah belum optimal | Kesadaran wajib pungut pajak dan retribusi daerah masih rendah |
| | | | Kesadaran wajib pajak dalam melaporkan objek pajak masih rendah |

3.2 Telaah Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Muna Barat tahun 2017 s/d 2022 :

“Terwujudnya Masyarakat Muna Barat Yang Sejahtera, Demokratis, Produktif Dan Berdaya Saing Dengan Dilandasi Oleh Nilai-Nilai Religius”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Muna Barat yang :

1. Sejahtera yakni merefleksikan peningkatan pertumbuhan ekonomi Daerah Muna Barat yang berkeadilan ditopang oleh pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada agropolitan dan minapolitan.
2. Demokratis yakni Penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat serta bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terefleksikan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tata kelola keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP), dan kehidupan kemasyarakatan, berbangsa, bernegara yang harmonis dan toleran.
3. Produktif yakni Merefleksikan pembangunan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, Sehat, Produktif, Inovatif, Berkarakter dan Berbudi Pekerti Luhur dalam menghadapi persaingan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA).
4. Berdaya Saing yakni merefleksikan keberadaan infrastruktur Wilayah yang memadai dan berkualitas dalam mendukung Penataan dan daya saing pengembangan Wilayah khususnya pada pengembangan

Pusat-pusat pertumbuhan wilayah, pembangunan Desa, dan Pulau-Pulau Kecil dan merefleksikan pengelolaan Pariwisata dan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta Pelestarian/pengembangan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal.

5. Religius yakni Merefleksikan masyarakat Kabupaten Muna Barat memiliki jati diri sebagai insan yang berbudaya, Berkarakter, Berbudi Pekerti Luhur, dan berakhlak mulia dalam menjaga persatuan dan kesatuan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan beragama yang harmonis dan toleran.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Muna Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022, maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia yang kreatif, sehat, produktif, inovatif, berkarakter dan berbudi pekerti luhur;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar wilayah yang memadai dan berkualitas;
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agropolitan dan minapolitan;
4. Mengembangkan potensi wisata, Lingkungan Hidup yang Lestari, dan Keragaman Budaya Daerah Sesuai dengan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat.

Sesuai dengan ketugasan/kewenangannya, maka BPKAPD memberi dukungan untuk mewujudkan indikator kinerja tujuan dan sasaran daerah dari misi pertama dan misi ketiga. Keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Muna Barat dengan tugas, pokok dan tata kerja BPKAPD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama BPKAPD

| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator | Formula |
|-----------|---|------------------|--|---|--|
| MISI 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah daerah | Opini WTP | Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | $\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan OPD sesuai SAP}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan OPD Muna Barat}} \times 100\%$ |
| | | | Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional | Persentase Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal dan Akuntabel | Jumlah Aset Yang Dikelola Dengan Baik / Jumlah Aset x 100% |
| | | | Meningkatnya Pengelolaan PAD | Pertumbuhan Peningkatan PAD | $\text{PAD} + \text{Retribusi} / \text{Total Pendapatan} \times 100\%$ |

3.3 Telaah Renstra K/L Dan Renstra OPD Provinsi

Berdasarkan sasaran rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2015-2019 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 diperoleh keterkaitan sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Telaah Renstra Kemendagri RI, Kemenkeu RI dan BKAD Prov. Sultra

| Kementrian Dalam Negeri | Kementrian Keuangan | BKAD Prov. Sultra |
|--|---|--|
| Meningkatnya kualitas pelaksanaan Otonomi Daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi | Meningkatkan kemampuan fiskal dan kinerja keuangan | Meningkatkan pendapatan daerah dari pajak retribusi dan lain-lain pendapatan |
| | Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif | Perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas | Meningkatkan kualitas pengelolaan asset daerah |
| | Pengelolaan kekayaan negara yang optimal | |

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada RPJMD

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mewajibkan pemerintah untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan kaidah atau prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,

rencana, dan/atau program dalam RPJMD. KLHS RPJMD merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program, pengintegrasian prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dilakukan sehingga kemungkinan terjadinya dampak negatif kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) terhadap lingkungan hidup dapat dihindari.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan gambaran bagaimana tata cara pengelolaan keuangan daerah seharusnya. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan dikelola berdasarkan pedoman yang sudah ditentukan dan laporan keuangan disusun berdasarkan SAP berbasis akrual sehingga opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah daerah kabupaten muna barat dapat diperoleh.

Jika ditelaah, maka terlihat adanya keseimbangan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAP berbasis akrual. Namun dalam implementasinya berbeda, sehingga masih terdapat berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis yaitu mengenai belum memadai implementasi SAP berbasis akrual.

Isu tersebut harus direspon secara cepat oleh BPKPAD Kab. Muna Barat dengan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang dijabarkan pada Lampiran Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Muna Barat adalah Presentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Pemerintah Daerah belum terdata.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Telah dilaksanakan analisa terhadap kinerja pelayanan BPKAPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2017-2018 dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi selama periode tersebut, telaah atas visi dan misi Bupati Muna Barat dan Wakil Bupati Muna Barat serta telaah atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang menghasilkan isu-isu strategis yang ditentukan yaitu sebagai berikut :

- a. Opini WTP atas LKPD Kabupaten Muna Barat dengan paragraf penjelas;
- b. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
- c. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan dan belanja daerah relatif masih rendah atau sebaliknya pendapatan transfer memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah dan mendanai belanja daerah;
- d. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
- e. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan; dan
- f. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa BPKAPD berusaha meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan dan aset daerah dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual sehingga opini wajar tanpa penjelasan terhadap LKPD Pemerintah Kabupaten Muna Barat tidak disertai paragraf penjelasan dapat diraih oleh Pemerintah Kabupaten Muna Barat dan selalu berupaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TUJUNA DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD merupakan perumusan strategis yang memiliki prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja BPKAPD selama periode lima tahun (tahun 2017-2022) pada bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan tujuan akhir dari visi yang telah ditetapkan diatas. Tujuan dan sasaran memiliki korelasi dengan pernyataan visi dan misi yang telah ditentukan oleh BPKAPD. Tujuan sebagai arah untuk merumuskan sasaran dan kebijakan. Sedang sasaran merupakan hasil nyata yang ingin dicapai oleh BPKAPD dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2017 s/d 2022

| NO. | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA | | | | | |
|-----|--|--|---|------------------------------------|------|------|---|---|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2020 | 2021 | 2022 | | | |
| 1 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah | Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Persentase Laporan Keuangan OPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional | Persentase Pengelolaan Aset Daerah yang Optimal dan Akuntabel | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | Meningkatnya Pengelolaan PAD | Pertumbuhan Peningkatan PAD | 90 | 97,5 | 97,5 | | | |

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Permendagri 86/2017, strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah antara lain: 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan); 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah); 4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya; 5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; 6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pembangunan. Berdasarkan pemahaman dan langkah-langkah tersebut maka rumusan strategi pembangunan jangka menengah BPKAPD Kabupaten Muna Barat dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1

Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Muna Barat

| | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| Visi : | | | | | |
| Terwujudnya Masyarakat Muna Barat yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdayasaing dengan Dilandasi oleh Nilai-Nilai Religius | | | | | |
| Tujuan | | Sasaran | | Strategi | |
| Misi-5 : | | | | | |
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. | | | | | |
| Tujuan-5 : | | Sasaran 12 : | | Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM aparatur perangkat daerah dalam mendorong akuntabilitas kinerja dan keuangan diiringi dengan optimalisasi sistem pengawasan internal | |
| Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik | | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | | | |
| Sasaran | | Arah Kebijakan | | | |
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Sasaran 12 : | | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan | Penguatan SPIP dan pemenuhan SDM pengawasan |

Berdasarkan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah BPKAPD telah menetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| VISI : Terwujudnya Masyarakat Muna Barat yang Sejahtera, Demokratis, Produktif dan Berdayasaing dengan Dilandasi oleh Nilai-Nilai Religius | | | |
|--|--|--|--|
| MISI - 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, efektif, partisipatif, transparan dan bermartabat. | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja keuangan daerah | Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Meningkatkan komitmen dan konsistensi semua pihak terkait proses pengelolaan anggaran belanja daerah | Evaluasi dan pengawasan terhadap penyerapan belanja daerah di seluruh OPD |
| | Terwujudnya Sistem Pengelolaan Aset Daerah Yang Profesional | Terintegritasi Pengelolaan BMD dengan pemanfaatan teknologi informasi | Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan SIM Aset |
| | | Inventarisasi dan verifikasi Barang Milik Daerah | Meningkatkan SDM Pengelola BMD |
| | Terwujudnya Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Optimalisasi sumber-sumber PAD melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola pendapatan |
| | | Optimalisasi sumber-sumber DBH dan pendapatan lain yang sah | Peningkatan koordinasi antar OPD penghasil dan meningkatkan SDM pengelola DBH dan pendapatan lain yang sah |

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi yang ditetapkan sehingga sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat dicapai. Sedang kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Tahun 2021 s/d 2022 BPKAPD telah merencanakan melaksanakan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Ke-4 program tersebut merupakan program yang secara rutin dilaksanakan BPKAPD dalam upaya melaksanakan tugas, pokok, tata kerja, dan kewenangan di bidang pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah yang merupakan program utama/inti maupun program pendukung/program penunjang. Program utama atau inti adalah program yang dilaksanakan terkait secara langsung dalam pencapaian indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sehingga tujuan akhir yang terkandung dalam visi dapat dicapai. Sedang program pendukung/penunjang adalah sebagai program operasional yang menunjang terlaksananya tugas, pokok, dan tata kerja BPKAPD yang secara tidak langsung mendukung pencapaian target indikator kinerja dari sasaran strategis.

Berikut disajikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAPD Kabupaten Muna Barat yang mulai operasional pada tahun 2017.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah, pelayanan administrasi keuangan dan umum serta peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur sehingga dengan adanya hasil/keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan

tercipta kelancaran dalam menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
 - b. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan
 - c. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi
 - d. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
 - e. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - f. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - g. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
 - h. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
 - i. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. Administrasi Umum
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
 - e. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - g. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - h. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - i. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - j. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - k. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - l. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - m. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- n. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - o. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - p. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - q. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - r. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - s. Pengadaan Mobil Jabatan
 - t. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
 - u. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - v. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - w. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - x. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - y. Pengadaan Mebeleur
 - z. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan
 - aa. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
 - bb. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - cc. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
 - dd. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - ee. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
 - ff. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - gg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas
 - hh. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - ii. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - jj. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
 - kk. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas
 - ll. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
 - mm. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan
 - nn. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional
4. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
 - c. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
 - d. Pengadaan Pakaian Korpri
 - e. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
 - f. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
 - g. Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas
 - h. Pemandahan Tugas PNS

- i. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - j. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - k. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan Keuangan OPD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - a. Penyusunan KUA dan PPAS Penyusunan
 - b. Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - c. Penyusunan dan Review RKA OPD/Perubahan RKA OPD
 - d. Penyusunan dan Review DPA OPD/Perubahan DPA OPD
 - e. Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
 - f. Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
 - g. Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD
 - h. Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran
 - i. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
 - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
 - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - a. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - b. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
 - c. Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
 - d. Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D
 - e. Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP
 - f. Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - g. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas

- h. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait
- i. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ)
- j. Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
- 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
 - b. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - e. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA
 - f. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - g. Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan
 - h. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
 - i. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
 - j. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial
 - k. Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
- 4. Kegiatan Penunjang Urusan
 - a. Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah
 - b. Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi
 - c. Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan BMD. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang
- b. Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
- c. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- d. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah
- e. Penatausahaan Barang Milik Daerah
- f. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- g. Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- h. Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah
- i. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- j. Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- k. Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- l. Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari OPD
- m. Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dimaksudkan untuk Penatausahaan Pendapatan Daerah. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - a. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - b. Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - c. Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- d. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- e. Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat
- f. Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi
- g. Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi
- h. Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- i. Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- j. Pemeriksaan Pajak Daerah
- k. Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Program dan kegiatan, indikator kinerja beserta dana yang diperlukan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BPKAPD Kabupaten Muna Barat

| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA | Indikator Kiinerja | Target Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kinerja akhir periode RPJMD (2022) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab | | | | |
|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|-----|--------|-----|
| | | | | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp. | | Target | Rp. | Target | Rp. |
| | | | | | | | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | | | | | | |
| 5 | 02 | | | | KEUANGAN | | | | 9.653.400.000 | | 10.026.400.000 | | 10.527.400.000 | | 20.553.800.000 | BPKAPD | | | |
| X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Nilai SAKIP OPD | 100 | 6.673.558.000 | 100 | 7.007.558.000 | 100 | 7.358.558.000 | 100 | 14.366.116.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | | - | 100 | 235.000.000 | 100 | 285.000.000 | 100 | 520.000.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Ketepatan waktu penetapan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | | | 100 | 50.000.000 | 100 | 55.000.000 | 100 | 105.000.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 02 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Persen Program dan Kegiatan yang konsisten antara renstra dan renja pada tahun berkenan | | | 100 | 45.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 95.000.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 03 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan tepat waktu | | | 100 | 40.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 85.000.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah | | | 3 kali | 60.000.000 | 4 kali | 90.000.000 | 7 kali | 150.000.000 | BPKAPD | | | | |
| | | 01 | 2.01 | 05 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Rapat Evaluasi Kinerja internal Perangkat Daerah | | | 100 | 40.000.000 | 100 | 45.000.000 | 100 | 85.000.000 | BPKAPD | | | | |
| | | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan | Kategori Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan | 100 | 4.075.028.581 | 100 | 4.124.528.581 | 100 | 4.151.528.581 | 100 | 8.276.057.162 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah orang Penerima Gaji dan Tunjangan ASN | 24 PNS | 2.832.528.581 | 24 PNS | 2.832.528.581 | 24 PNS | 2.832.528.581 | 24 PNS | 5.665.057.162 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah ASN yang menyampaikan Laporan Kinerja Individu | | | | | | | | - | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 03 | Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi | Jumlah bahan verifikasi bulanan | | | | | | | | - | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 04 | Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | Jumlah Dokumen Akuntansi dan Laporan Keuangan | 2 dokumen | 143.000.000 | 2 dokumen | 143.000.000 | 2 dokumen | 145.000.000 | 2 dokumen | 288.000.000 | BPKAPD | | | | |
| | | | | | | Jumlah orang | 72 OB | 924.000.000 | 72 OB | 924.000.000 | 72 OB | 924.000.000 | 72 OB | 1.848.000.000 | BPKAPD | | | | |
| X | XX | 01 | 2.02 | 05 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | persentase hasil pemeriksaan yang ditanggapi | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 200.000.000 | BPKAPD | | | | |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|
| X | XX | 01 | 2.02 | 06 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD | Ketersediaan Dokumen LAKIP OPD yang disampaikan tepat waktu | ada | 44.000.000 | ada | 45.000.000 | ada | 50.000.000 | ada | 95.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.02 | 07 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran | Ketersediaan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran yang disampaikan tepat waktu | ada | 15.000.000 | ada | 25.000.000 | ada | 30.000.000 | ada | 55.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.02 | 08 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disampaikan tepat waktu | | | 100 | 30.000.000 | 100 | 35.000.000 | 100 | 65.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.02 | 09 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disampaikan tepat waktu | ada | 16.500.000 | ada | 25.000.000 | ada | 35.000.000 | ada | 60.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | | Administrasi Umum | Persentase Pemenuhan Admistrasi Umum | 100 | 2.538.529.419 | 100 | 2.588.029.419 | 100 | 2.787.029.419 | 100 | 5.375.058.838 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kebutuhan Surat Menyurat yang dipenuhi | | | 100 | 4.000.000 | 100 | 5.000.000 | 100 | 9.000.000 | BPKAPD |
| | | | | | | Jumlah orang petugas pelayanan | 9 ob | 108.000.000 | 9 ob | 108.000.000 | 9 ob | 108.000.000 | 9 ob | 216.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah MBPS jaringan internet | 12 bulan | 75.000.000 | 12 bulan | 80.000.000 | 12 bulan | 85.000.000 | 12 bulan | 165.000.000 | BPKAPD |
| | | | | | | Volume M3 Air | | | 216000 M3 | 8.000.000 | 216000 M3 | 10.000.000 | 216000 M3 | 19.000.000 | BPKAPD |
| | | | | | | Jumlah KWh Listrik | 10.500 kwh | 65.000.000 | 10.500 kwh | 65.000.000 | 10.500 kwh | 65.000.000 | 10.500 kwh | 130.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Luas Area Perkantoran yang dibersihkan | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 04 | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS | Jumlah PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 05 | Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah yang mendapat jaminan | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 06 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas yang dipelihara/ Diperpanjang perizinannya | unit | 13.000.000 | unit | 13.000.000 | unit | 20.000.000 | unit | 33.000.000 | BPKAPD |
| | | | | | | Pajak Kendaraan Roda 4 | 6 unit | 7.000.000 | 7 unit | 8.000.000 | 8 unit | 12.000.000 | 8 unit | 19.000.000 | BPKAPD |
| | | | | | | Pajak Kendaraan Roda 2 | 27 unit | 6.000.000 | 27 unit | 6.000.000 | 27 unit | 8.000.000 | 27 unit | 14.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 07 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Pemenuhan Jasa Administrasi Keuangan | 100 | 179.400.000 | 100 | 179.400.000 | 100 | 179.400.000 | 100 | 358.800.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 08 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Pemenuhan Alat Kebersihan dan bahan pembersih Kantor | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 45.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--|---|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|---------------|---------------|
| | | | | | | jumlah orang | 3 OB | 36.000.000 | 3 OB | 36.000.000 | 3 OB | 36.000.000 | 3 OB | 72.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 09 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | Kebutuhan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang dipenuhi | 100 | 98.000.000 | 100 | 100.000.000 | 100 | 110.000.000 | 100 | 210.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 11 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan yang dipenuhi | 100 | 129.829.419 | 100 | 129.829.419 | 100 | 139.829.419 | 100 | 269.658.838 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang dibutuhkan | 100 | 24.000.000 | 100 | 24.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 49.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipenuhi | 100 | 30.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 125.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Kebutuhan Logistik kantor yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Kebutuhan Makanan dan Minuman yang dipenuhi | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 220.000.000 | 100 | 440.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 18 | Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 100 kali | 820.000.000 | 100 kali | 829.500.000 | 100 kali | 840.500.000 | 100 kali | 1.670.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 19 | Pengadaan Mobil Jabatan | Jumlah pengadaan Mobil Jabatan | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 20 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 | 1 unit | 180.000.000 | 1 unit | 180.000.000 | 1 unit | 180.000.000 | 1 unit | 360.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2 | | | | | 2 unit | 60.000.000 | 2 unit | 60.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 21 | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | Kebutuhan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 50.000.000 | 1 unit | 100.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 23 | Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | Kebutuhan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 24 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi | 14 unit | 114.500.000 | 14 unit | 114.500.000 | 16 unit | 149.500.000 | 16 unit | 264.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 25 | Pengadaan Mebeleur | Kebutuhan Mebeleur yang dipenuhi | 21 unit | 40.500.000 | 21 unit | 40.500.000 | 21 unit | 40.500.000 | 21 unit | 81.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|
| X | XX | 01 | 2.03 | 26 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | Luas Rumah Jabatan yang dipelihara | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 27 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Luas Rumah Dinas yang dipelihara | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Luas Gedung Kantor yang dipelihara | 100 | 128.300.000 | 100 | 128.300.000 | 100 | 128.300.000 | 100 | 256.600.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 29 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 yang dipelihara | 6 unit | 80.000.000 | 6 unit | 80.000.000 | 6 unit | 100.000.000 | 6 unit | 180.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2 yang dipelihara | 27 unit | 40.000.000 | 27 unit | 40.000.000 | 27 unit | 45.000.000 | 27 unit | 85.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 31 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | kebutuhan Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 33 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang dipenuhi | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | kebutuhan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor yang dipenuhi | 100 | 37.000.000 | 100 | 37.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 77.000.000 | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 35 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 36 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | Luas Rumah Jabatan yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 37 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas | Luas Rumah Dinas yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 38 | Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor | Luas Rumah Gedung kantor yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| | | 01 | 2.03 | 39 | Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan | Jumlah Mobil Jabatan yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.03 | 40 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-4 yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| | | | | | | Jumlah Kendaraan Dinas Roda-2 yang direhab | | | | | | | | - | BPKAPD |
| X | XX | 01 | 2.04 | | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persen ASN yang tidak melanggar disiplin | 100 | 60.000.000 | 100 | 60.000.000 | 100 | 135.000.000 | 100 | 195.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|--------|---------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|--------|
| X | XX | | | | | Persen ASN OPD yang memiliki sertifikat kompetensi | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 01 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah Mesin/Kartu Absensi | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | | | | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 03 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah Pakaian Kerja Lapangan | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 04 | Pengadaan Pakaian Korpri | Jumlah Pakaian Korpri | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 05 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | | | | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 06 | Pemulangan Pegawai yang Pensiun | Jumlah Pegawai yang Pensiun yang dipulangkan | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 07 | Pemulangan Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas | persen Pegawai yang Tewas dalam Melaksanakan Tugas yang dipulangkan | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| X | XX | 01 | 2.04 | 08 | Pemindahan Tugas PNS | Jumlah PNS yang dipindah tugaskan | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| | | 01 | 2.04 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah PNS yang memperoleh sertifikat kelulusan Diklat Formal | 10 PNS | 60.000.000 | 10 PNS | 60.000.000 | 12 PNS | 100.000.000 | 13 PNS | 160.000.000 | | BPKAPD |
| 1 | | 01 | 2.04 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang memahami Peraturan Perundang-Undangan yang disosialisasi | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| | | 01 | 2.04 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah PNS yang mampu mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan yang dibintakan | | | | | | | | - | BPKAPD | |
| 5 | 02 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Persentase penatausahaan keuangan OPD sesuai pedoman penatausahaan keuangan daerah | 100 | 2.205.400.000 | 100 | 2.205.400.000 | 100 | 2.315.400.000 | 100 | 4.520.800.000 | | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Rancangan Perda tentang APBD dan perubahannya disampaikan ke DPRD tepat waktu | 100 | 890.540.000 | 100 | 890.540.000 | 100 | 925.540.000 | 100 | 1.816.080.000 | | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan KUA dan PPAS | sesuai /tidak sesuai jadwal | 100 | 50.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 20.000.000 | 100 | 40.000.000 | | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | sesuai /tidak sesuai jadwal | 100 | 41.500.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 18.000.000 | 100 | 36.000.000 | | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 03 | Penyusunan dan Review RKA OPD/Perubahan RKA OPD | jumlah RKA OPD/RKA Perubahan yang direwiv | 100 | 21.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 15.000.000 | 100 | 30.000.000 | | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 04 | Penyusunan dan Review DPA OPD/Perubahan DPA OPD | jumlah RKA OPD/DPA Perubahan yang direwiv | 100 | 14.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 14.000.000 | 100 | 28.000.000 | | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 05 | Penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD | sesuai /tidak sesuai jadwal | 100 | 450.000.000 | 100 | 400.000.000 | 100 | 405.000.000 | 100 | 805.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 06 | Penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD | sesuai /tidak sesuai jadwal | 100 | 250.000.000 | 100 | 235.000.000 | 100 | 235.000.000 | 100 | 470.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 07 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Teknis Penyusunan Anggaran OPD | ada/tidak ada | 100 | 51.040.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 25.000.000 | 100 | 50.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 08 | Penyusunan Regulasi Bidang Anggaran | ada/tidak ada | 100 | 13.000.000 | 100 | 13.540.000 | 100 | 13.540.000 | 100 | 27.080.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 09 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan | | | 5 kali | 25.000.000 | 6 kali | 30.000.000 | 7 kali | 55.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah | | | 25 kali | 100.000.000 | 26 kali | 120.000.000 | 27 kali | 220.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | jumlah koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan | | | 5 kali | 25.000.000 | 6 kali | 30.000.000 | 7 kali | 55.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah | Pencairan Tepat waktu | 100 | 567.860.000 | 100 | 567.860.000 | 100 | 602.860.000 | 100 | 1.170.720.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | jumlah koordinasi dan pengelolaan kas daerah | 15 kali | 69.000.000 | 15 kali | 69.000.000 | 16 kali | 75.000.000 | 17 kali | 144.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 02 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah | jumlah koordinasi pembiayaan daerah | 10 kali | 50.000.000 | 10 kali | 50.000.000 | 11 kali | 60.000.000 | 12 kali | 110.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | jumlah koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 6 kali | 29.000.000 | 6 kali | 29.000.000 | 7 kali | 35.000.000 | 8 kali | 64.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Pemrosesan, Penerbitan dan Pendistribusian Lembar SP2D | jumlah SP2D yang diproses, diterbitkan dan didistribusikan | 100 | 74.000.000 | 100 | 74.000.000 | 100 | 74.000.000 | 100 | 148.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | jumlah koordinasi Pelaksanaan dan Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, Pemberian Pembebanan Rincian Penggunaan Atas Pengesahan SPJ Gaji dan Non Gaji, Serta Penerbitan SKPP | 8 kali | 42.000.000 | 8 kali | 42.000.000 | 8 kali | 42.000.000 | 10 kali | 84.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | jumlah koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 8 kali | 46.000.000 | 8 kali | 46.000.000 | 9 kali | 50.000.000 | 10 kali | 96.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | jumlah koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah Sebagai Optimalisasi Kas | 5 kali | 26.000.000 | 5 kali | 26.000.000 | 6 kali | 35.000.000 | 7 kali | 61.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait | jumlah OPD yang melakukan rekon | 42 OPD | 120.000.000 | 42 OPD | 120.000.000 | 42 OPD | 120.000.000 | 42 OPD | 240.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | jumlah juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban (SPJ) | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 80.000.000 | 1 | 160.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | jumlah anggaran kas dan SPD yang diterbitkan dan dikendalikan | 42 | 31.860.000 | 42 | 31.860.000 | 42 | 31.860.000 | 42 | 63.720.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah | pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah disampaikan tepatwaktu ke BPK | 100 | 672.000.000 | 100 | 672.000.000 | 100 | 707.000.000 | 100 | 1.379.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | jumlah koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | 7 kali | 44.000.000 | 5 kali | 30.000.000 | 6 kali | 40.000.000 | 7 kali | 70.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 10 kali | 180.000.000 | 8 kali | 80.000.000 | 9 kali | 90.000.000 | 10 kali | 170.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | jumlah koordinasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi | 24 kali | 98.000.000 | 5 kali | 40.000.000 | 6 kali | 45.000.000 | 7 kali | 85.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | jumlah koordinasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota | 30 kali | 188.000.000 | 9 kali | 90.000.000 | 10 kali | 100.000.000 | 11 kali | 190.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Konsolidasi Laporan Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | jumlah koordinasi Keuangan OPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA | 5 kali | 38.000.000 | 5 kali | 38.000.000 | 5 kali | 38.000.000 | 6 kali | 76.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-----|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | jumlah LHP yang di Tanggapi/Tindak Lanjuti | | | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 80.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | dokumen rekon Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan | 1 | 63.000.000 | 1 | 63.000.000 | 1 | 63.000.000 | 1 | 126.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | dokumen laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang dianalisis | 1 | 61.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 100.000.000 | 1 | 200.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | dokumen panduan teknis dan kebijakan Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | 1 | 26.000.000 | 1 | 26.000.000 | 1 | 52.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | ada/tidak ada | | | ada | 90.000.000 | ada | 90.000.000 | ada | 180.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Verifikasi dan Pengujian atas Bukti Memorial | ada/tidak ada | | | ada | 30.000.000 | ada | 30.000.000 | ada | 60.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | frekuensi Pembinaan dan Sosialisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun | | | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 90.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | | Kegiatan Penunjang Urusan | lancar/tidak lancar penyelenggaraan penunjang urusan keuangan daerah | 100 | 75.000.000 | 100 | 75.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 155.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 01 | Pelaksanaan Pinjaman Pada Pemerintah Daerah | ada/tidak ada | ada | 25.000.000 | ada | 25.000.000 | ada | 26.000.000 | ada | 51.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 02 | Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan, Alokasi dan Pemberian Subsidi | ada/tidak ada | ada | 25.000.000 | ada | 25.000.000 | ada | 27.000.000 | ada | 52.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 03 | Pelaksanaan Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus | ada/tidak ada | ada | 25.000.000 | ada | 25.000.000 | ada | 27.000.000 | ada | 52.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan tepat waktu | | 374.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 412.000.000 | 100 | 805.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan Barang Milik Daerah | persentase aset daerah yang dikelola | | 374.000.000 | 100 | 393.000.000 | 100 | 412.000.000 | 100 | 805.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 01 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | jumlah koordinasi Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang | | | 10 kali | 12.000.000 | 10 kali | 12.000.000 | 11 kali | 24.000.000 | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|-------------------|---|---|-------------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|--------|
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 10 kali | 18.000.000 | 10 kali | 18.000.000 | 11 kali | 36.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | 8 kali | 23.000.000 | 8 kali | 23.000.000 | 9 kali | 46.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Rencana Pemeliharaan/Perawatan Barang Milik Daerah | | | 10 kali | 23.000.000 | 10 kali | 23.000.000 | 11 kali | 46.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | jumlah aset daerah | 80.000.000 | | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 60.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pelaksanaan Pembinaan dan Sosialisasi Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | frekuensi Pembinaan dan Sosialisasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun | | | 12 | 45.000.000 | 12 | 45.000.000 | 12 | 90.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | jumlah aset daerah | 70.000.000 | | 100 | 50.000.000 | 100 | 50.000.000 | 100 | 100.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 07 | Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Pengamanan Fisik, Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah | 47.000.000 | | 100 | 47.000.000 | 100 | 47.000.000 | 100 | 94.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 08 | Koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Hasil Penilaian Barang Milik Daerah | 29.000.000 | | 7 kali | 35.000.000 | 8 kali | 40.000.000 | 9 kali | 75.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 09 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 59.000.000 | | 6 kali | 30.000.000 | 6 kali | 32.000.000 | 7 kali | 62.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 10 | Koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi, pengawasan dan pengendalian atas Pemindahtanganan Barang Milik Daerah | | | 6 kali | 30.000.000 | 6 kali | 34.000.000 | 7 kali | 64.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 11 | Koordinasi Pelaksanaan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | 6 kali | 30.000.000 | 6 kali | 33.000.000 | 7 kali | 63.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 12 | Konsolidasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dari OPD | jumlah Laporan Barang Milik Daerah dari OPD yang dikonsolidasikan | 77.000.000 | | 100 | 30.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 60.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 03 | 2.01 | 13 | Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah | jumlah koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah | 12.000.000 | | 6 kali | 35.000.000 | 7 kali | 40.000.000 | 8 kali | 75.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | % Capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah | 100 | 400.442.000 | 100 | 420.442.000 | 100 | 441.442.000 | 100 | 861.884.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | >>> harusnya 2.01 | Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah | kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD | 400.442.000 | | | | | | | - | BPKAPD |

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|-----|------------|--------|------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 01 | Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah | ada/tidak ada | ada | 48.000.000 | ada | 40.000.000 | ada | 40.000.000 | ada | 80.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 02 | Penyusunan Kebijakan Tentang Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diintensifikasi | 100 | 52.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 40.000.000 | 100 | 80.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 03 | Perumusan Standarisasi Kebijakan Operasional Prosedur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah SOP Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1 | 43.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 35.000.000 | 2 | 70.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 04 | Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Tentang Sistem Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah rekomendasi kebijakan tentang Administrasi Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 100 | 95.400.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 80.000.000 | 100 | 160.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 05 | Perumusan Kebijakan Strategi Penyuluhan dan Penyebarluasan Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Masyarakat | Jumlah rekomendasi kebijakan strategis | | | 100 | 20.000.000 | 100 | 23.000.000 | 100 | 43.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 07 | Perumusan Kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | Jumlah rekomendasi kebijakan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Yang Berbasis Teknologi Informasi | | | 100 | 20.000.000 | 100 | 23.000.000 | 100 | 43.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 08 | Konsultasi dan Pendampingan Wajib Pajak dan Retribusi | jumlah konsultasi | | | 8 kali | 80.000.000 | 9 kali | 90.000.000 | 10 kali | 170.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 09 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | ada/tidak ada | 100 | 56.042.000 | ada | 35.000.000 | ada | 35.000.000 | ada | 70.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 10 | Pemeliharaan dan Pemutakhiran Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | jumlah Basis Data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terpelihara dan dimutakhirkan | 100 | 48.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 32.000.000 | 100 | 62.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 11 | Pemeriksaan Pajak Daerah | frekuensi pajak daerah yang diperiksa | | 58.000.000 | 100 | 30.000.000 | 100 | 31.000.000 | 100 | 61.000.000 | BPKAPD |
| 5 | 02 | 04 | 2.02 | 12 | Monitoring dan Evaluasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | dokumen monev Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dipungut | | | 100 | 10.442.000 | 100 | 12.442.000 | 100 | 22.884.000 | BPKAPD |

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan indikator kinerja dari sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan akhir yang terkandung dalam makna visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Muna Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022, BPKAPD bertanggungjawab atas sasaran sebagai berikut :

Sasaran 12 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah”

Sesuai dengan wewenang dan urusan yang ditangani BPKAPD bertanggungjawab atas tercapainya dua indikator kinerja dari sasaran 12. Dengan demikian ada 4 indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab dan menjadi indikator kinerja utama BPKAPD selama lima tahun (tahun 2017-2022) target dari ke empat indikator kinerja utama tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama BPKAPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator Kinerja | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|----|--|-----------------------------|----------|-----------|----------|---------|--|
| | | Tahun I | Tahun II | Tahun III | Tahun IV | Tahun V | Tahun 2022 |
| | | 2021 | 2022 | | | | |
| 1. | Presentase Alokasi Anggaran Belanja Langsung Dan BTL | 100 | 100 | | | | 100 |
| 2. | Presentase Jumlah Aset Yang Dikelola Pemerintah Daerah | 100 | 100 | | | | 100 |
| 3. | Pertumbuhan Peningkatan PAD | 100 | 100 | | | | 100 |
| 4. | Persentase DBH dan Pendapatan Lain Yang Sah | 100 | 100 | | | | 100 |

Sesuai dengan tugas pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 30 Tahun 2017 Sekretariat BPKAPD dan seluruh bidang di jajaran BPKAPD telah merumuskan indikator kinerja (outcome) dari program inti yang dilaksanakan yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mendukung tercapai ke empat indikator kinerja utama BPKAPD. Keberhasilan pencapaian atas target indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program utama/inti akan memberi gambaran atau informasi semakin akuntabilitas terlaksananya tata kelola keuangan daerah berbasis akrual dengan meningkatnya peranan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pendanaan atas pengeluaran belanja daerah menuju *good* dan *clean government*. Selain itu indikator kinerja program yang dihasilkan juga menggambarkan terlaksananya ketugasan BPKAPD sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pembantu Sekretariat Daerah selaku pengelola barang daerah.

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kaidah Pelaksanaan

Renstra-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud telah melalui proses verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Muna Barat No. 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat, akan dipergunakan sebagai berikut.

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan dan bahan penyusunan rancangan RKPD;
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sertasebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

8.2. Pedoman Transisi

Perubahan Renstra-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Muna Barat Tahun 2017-2022 selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja-PD Badan Pengelola Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Barat Tahun 2021-2022, disamping Renja Tahun 2017-2020 yang telah diimplementasikan.

Sehubungan dengan masa berakhirnya Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat pada bulan Februari Tahun 2022 dan Pilkada Langsung secara serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga selama tahun 2022-2024 pemerintah kabupaten Muna Barat akan dipimpin oleh Penjabat Bupati. Dalam rangka menjamin keberlangsungan Perencanaan Pembangunan Daerah selama tahun 2022-2024 tersebut, maka penyusunan Renja PD Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan Renstra Kabupaten Muna Barat tahun 2017-2022 dan Renja Tahun 2023 dan Renja Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2005-2025, dan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan serta Program Prioritas Renstra-PD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023.

Apabila dikemudian hari Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laworo, 10 Januari 2020

Kepala, BPKAPD,



ROSMA SARI LAUTE, SE, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol.IV/c

NIP. 19640803 199211 2 001